

## **BAB II**

### **BRITISH MUSEUM SEBAGAI INSTITUSI**

Perkembangan British Museum sebagai salah satu institusi kebudayaan global tidak dapat dilepaskan dari konteks sejarah panjang imperialisme Inggris. Sejak didirikan pada abad ke-18, museum ini berkembang seiring dengan ekspansi kolonial Inggris, yang turut membuka akses terhadap berbagai artefak dari wilayah-wilayah yang pernah berada di bawah kekuasaan maupun pengaruhnya. Bab II skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai fokus penelitian ini yang dibagi ke dalam tiga bagian utama: sejarah dan perkembangan British Museum sebagai suatu institusi, koleksi British Museum dan asal-usulnya dengan menyoroti berbagai mekanisme akuisisi yang digunakan, serta kontroversi yang melingkupi British Museum, khususnya terkait isu legalitas dan moralitas kepemilikan artefak. Ketiga bagian ini akan menjadi landasan analisis pada bab-bab berikutnya.

#### **2.1. Sejarah dan Perkembangan British Museum**

British Museum adalah museum nasional publik gratis yang terletak di London, Inggris. Museum yang didirikan pada tahun 1753 ini merupakan salah satu museum publik terbesar dan tertua di dunia. British Museum didirikan atas dasar undang-undang parlemen dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan manusia melalui pengumpulan dan pelestarian benda-benda yang dianggap mewakili kemajuan peradaban global (Wilson, 2002).

Sebagai institusi, British Museum termasuk dalam badan publik non-departemen (NDPB) yang beroperasi secara independen dari pemerintah, namun tetap bertanggung jawab kepada parlemen. Institusi ini didukung dan disponsori oleh Departemen Kebudayaan, Media, dan Olahraga Inggris melalui perjanjian pengelolaan bersama. Sebelum menjadi institusi budaya global seperti sekarang, British Museum didasari oleh warisan koleksi pribadi Sir Hans Sloane (1660–1753). Sir Hans Sloane merupakan seorang dokter, naturalis, dan kolektor asal Inggris yang mendedikasikan masa hidupnya untuk mengoleksi ribuan spesimen tumbuhan, hewan, hingga barang-barang langka atau unik dari berbagai sumber. Melalui British Museum Act 1753, koleksi Sloane yang terdiri atas sekitar 71.000 benda diserahkan kepada negara dan menjadi dasar pendirian museum nasional pertama di dunia yang terbuka untuk publik.

Karier Sloane sebagai dokter maupun kolektor tidak dapat dipisahkan dari masa ekspansi imperial Inggris pada abad ke-17 dan ke-18. Pada masa ekspansi kolonial Inggris, Sloane ditugaskan ke Jamaika, sebuah koloni Inggris yang menjadi pusat produksi gula berbasis tenaga kerja budak. Dalam periode ini, ia memperluas koleksinya melalui eksplorasi langsung, pertukaran, maupun perolehan dari populasi lokal, termasuk para budak di Jamaika. Ia kemudian menikah dengan perempuan dari keluarga pemilik perkebunan tebu di Jamaika, yang bergantung pada sistem perbudakan. Profit dan relasi yang didapatkan dari sistem perbudakan ini membantu Sloane memperluas koleksinya (*Reconstructing Sloane*, t.t.; *Sir Hans Sloane Centre*, t.t.).

Selain dari relasi di Jamaika, Sloane juga mendapatkan koleksinya dari

bangsawan Inggris lain maupun pedagang dalam jaringan global Inggris pada masa itu (*Sir Hans Sloane | British Museum, t.t.*). Menjelang akhir hayatnya, Sloane mewariskan seluruh koleksinya kepada negara melalui Raja George II, dengan ketentuan bahwa ahli warisnya menerima kompensasi sebesar £20.000. Warisan tersebut disertai syarat bahwa Parlemen harus mendirikan sebuah museum publik yang dapat diakses oleh masyarakat luas untuk menampung koleksinya. Parlemen Inggris menerima ketentuan ini dan menghimpun dana melalui mekanisme lotre nasional. Pada 7 Juni 1753, undang-undang pendirian British Museum disetujui oleh kerajaan sehingga secara resmi menandai berdirinya institusi tersebut.

British Museum pertama berdiri di bangunan bernama Montague House, di Bloomsbury, London. Bangunan besar ini dibeli oleh pemerintah Inggris pada tahun 1753 untuk menampung koleksi Sir Hans Sloane yang didonasikan untuk pembukaan British Museum. Koleksi tersebut mencakup 32.000 koin dan medali dan 1.125 ‘benda-benda yang berkaitan dengan adat istiadat zaman dahulu’. Setelah renovasi untuk menyesuaikan dengan koleksi, British Museum resmi dibuka bagi masyarakat pada tahun 1759. Di awal pengoperasiannya, masyarakat harus terlebih dahulu memesan tiket untuk melihat koleksi museum selama jam kunjungan yang terbatas. Pada kenyataannya, ini berarti akses hanya terbatas bagi pengunjung yang memiliki koneksi dan *privilege* untuk menikmati tur privat bersama pemandu museum (Wilson, 2002; *History | British Museum, t.t.*).

Seiring perkembangannya pada abad ke-19, museum mengalami transformasi signifikan menjadi institusi publik yang lebih terbuka, ditandai

dengan pembangunan gedung baru bergaya neoklasik serta pengembangan sistem klasifikasi dan kurasi koleksi. Transformasi ini juga diiringi dengan perluasan fungsi museum sebagai pusat edukasi dan penelitian, terutama dengan hadirnya Reading Room pada tahun 1857 yang memperkuat perannya sebagai pusat intelektual. Seiring dengan ekspansi wilayah imperial Inggris, koleksi museum berkembang pesat dan semakin mencerminkan cakupan global, dengan artefak yang berasal dari berbagai wilayah di luar Inggris.

Perkembangan British Museum pada masa Perang Dunia menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam pengelolaan koleksi serta operasional institusi. Selama Perang Dunia Pertama, museum ditutup dalam jangka waktu yang cukup lama sebagai langkah preventif terhadap potensi kerusakan akibat konflik. Dalam periode ini, berbagai koleksi dipindahkan ke lokasi yang lebih aman, seperti bunker bawah tanah, sementara artefak yang tidak dapat dipindahkan dilindungi menggunakan *sandbags* (Stuart, 2012). Kondisi serupa kembali terjadi pada Perang Dunia Kedua, ketika ancaman pengeboman oleh Nazi Jerman semakin meningkat. Dalam waktu singkat, sebagian besar koleksi kembali dievakuasi ke tempat yang lebih aman, dan sejumlah ruang pameran dikosongkan sebagai bagian dari upaya perlindungan. Langkah ini terbukti krusial, mengingat serangan udara Blitz pada Mei 1941 menyebabkan kerusakan signifikan pada bangunan museum. Koleksi baru dapat ditampilkan kembali secara bertahap pada tahun 1947, sementara proses restorasi fisik bangunan berlangsung hingga dekade 1960-an (*The British Museum and the Blitz*, t.t.).

Memasuki periode pasca-Perang Dunia II, British Museum mengalami

transformasi kelembagaan yang penting, salah satunya melalui pemberlakuan British Museum Act 1963. Regulasi ini menggantikan dasar hukum sebelumnya, yaitu Act of Parliament 1753, yang dinilai sudah tidak relevan dengan kebutuhan institusi modern. Undang-undang tersebut mencakup restrukturisasi kepemimpinan, redefinisi tugas dan wewenang direktur, serta pemisahan kelembagaan dari Natural History Museum. Salah satu aspek paling signifikan adalah pengaturan terkait peminjaman dan pengelolaan koleksi, termasuk pembatasan pengeluaran artefak secara permanen dari koleksi museum. Ketentuan ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap koleksi, tetapi juga sebagai upaya untuk mencegah praktik penyalahgunaan wewenang oleh pihak internal dalam bentuk penjualan atau pengalihan artefak secara ilegal.

Perkembangan selanjutnya semakin terlihat seiring dengan kemajuan teknologi informasi pada akhir abad ke-20. British Museum mulai mengembangkan platform digital dengan meluncurkan situs web resmi pada akhir 1990-an, yang kemudian diikuti oleh upaya digitalisasi koleksi. Inisiatif ini bertujuan untuk memperluas akses publik terhadap koleksi tanpa batasan geografis. Pada tahun 2007, museum secara resmi meluncurkan katalog digital yang pada tahap awal mencakup sekitar 200.000 objek dalam bentuk gambar dan manuskrip yang diunggah secara bertahap (Griffiths, 2010). Sejak saat itu, situs web museum berkembang menjadi salah satu sumber informasi utama yang tidak hanya menyediakan akses terhadap koleksi, tetapi juga berfungsi sebagai sarana komunikasi institusional kepada publik global.

Selain transformasi digital, periode ini juga ditandai dengan perubahan dalam aspek representasi dan inklusivitas. Penunjukan Chief Emeka Anyaoku, mantan diplomat Nigeria dan mantan Sekretaris Jenderal Commonwealth, sebagai anggota dewan pengawas pada awal tahun 2000-an menandai perubahan signifikan dalam struktur kepemimpinan yang sebelumnya didominasi oleh orang berkulit putih. Sejak saat itu, museum mulai menunjukkan upaya untuk meningkatkan keberagaman dalam struktur organisasinya, termasuk dengan menunjuk anggota dewan dari latar belakang yang lebih beragam.

Memasuki dekade 2010 hingga saat ini, British Museum semakin menekankan aspek keterbukaan dalam penyajian koleksi. Hal ini terlihat dari upaya museum untuk mulai mengakui dan menjelaskan latar belakang historis koleksi yang kontroversial, termasuk yang berkaitan dengan kolonialisme. Perubahan ini tidak hanya tercermin dalam konten situs web yang diperbarui pada tahun 2021 (menggunakan Wayback Machine), tetapi juga pada label dan penjelasan yang disajikan di ruang pameran. Selain itu, museum juga mengembangkan program tur tematik yang lebih inklusif, seperti tur yang membahas artefak hasil penjarahan, sejarah komunitas LGBTQ+, serta koleksi berdasarkan wilayah asalnya (). Berbagai kegiatan seperti pameran dan acara kebudayaan juga diselenggarakan untuk memperluas representasi dan keterlibatan publik (*Exhibitions and Events | British Museum, t.t.*).

Pandemi COVID-19 menjadi salah satu faktor yang mempercepat transformasi digital museum. Penutupan sementara akibat kebijakan *lockdown* serta penurunan jumlah pengunjung mendorong museum untuk memperluas akses

daring (Hardaker, 2021). Hingga awal dekade 2020-an, basis data digital museum telah mencakup sekitar 40 juta entri koleksi, dan upaya digitalisasi terus dilakukan untuk mencakup seluruh koleksi yang dimiliki. Selain itu, museum juga mengembangkan fitur tur virtual yang memungkinkan pengunjung menjelajahi ruang-ruang museum secara daring serta mengakses koleksi secara individual melalui perangkat digital. Pemanfaatan media sosial seperti YouTube dan Instagram juga menjadi bagian dari strategi komunikasi untuk menyebarkan informasi mengenai koleksi dan kegiatan museum kepada audiens yang lebih luas (Romey, 2015; Cascone, 2020).

## **2.2. Koleksi Global British Museum**

Sebagai salah satu museum terbesar di dunia, British Museum memiliki koleksi yang sangat luas dan beragam. Diperkirakan museum ini menyimpan sekitar delapan juta objek yang berasal dari berbagai wilayah di dunia. Dari jumlah tersebut, sebagian telah didokumentasikan dalam basis data daring, dengan sekitar empat hingga lima juta objek yang telah diunggah secara digital, sementara sekitar dua juta objek dapat diakses oleh publik melalui katalog *online* museum. Meskipun demikian, hanya sekitar satu persen dari total koleksi yang dipamerkan secara langsung di galeri museum (British Museum, t.t.-a). Koleksi tersebut mencakup berbagai jenis artefak, mulai dari benda arkeologis, karya seni, manuskrip, hingga objek yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan budaya masyarakat dalam berbagai periode sejarah (British Museum, 2019).

Susunan pameran koleksi di British Museum dibagi ke dalam berbagai galeri yang tersebar di tiga lantai utama museum. Hingga saat ini, museum

memiliki sekitar 60 tema galeri yang tersebar dalam kurang lebih 95 ruang pameran, ditambah dua galeri virtual yang berfokus pada kawasan Oseania dan koleksi lukisan (*Galleries | British Museum, t.t.*). Sebagian besar galeri disusun berdasarkan wilayah asal koleksi, seperti galeri Afrika, Asia Barat, serta Yunani dan Romawi Kuno, sementara beberapa galeri lainnya menggunakan pendekatan tematik, seperti galeri *Living and Dying* yang menampilkan artefak terkait kehidupan dan praktik budaya masyarakat *Indigenous* dari Oseania, Afrika, dan Asia.

Dari seluruh ruang pameran tersebut, kawasan Eropa menjadi wilayah dengan jumlah galeri terbanyak, yaitu sekitar 24 ruangan, di mana 17 di antaranya didedikasikan untuk koleksi Yunani dan Romawi Kuno. Setelah itu, kawasan Afrika dan Asia Barat memiliki sekitar 17 ruang pameran, serta sembilan galeri internasional yang menampilkan artefak dari berbagai wilayah dunia berdasarkan tema tertentu. Beberapa artefak yang dipamerkan di galeri internasional tersebut juga memiliki keterkaitan dengan sejarah kolonialisme dan aktivitas imperial Inggris, seperti patung batu Hoa Hakananai'a dari Pulau Paskah yang dipamerkan di galeri *Living and Dying*, serta Wayang dan Topeng Jawa dari Indonesia yang dipamerkan di galeri *Enlightenment*.



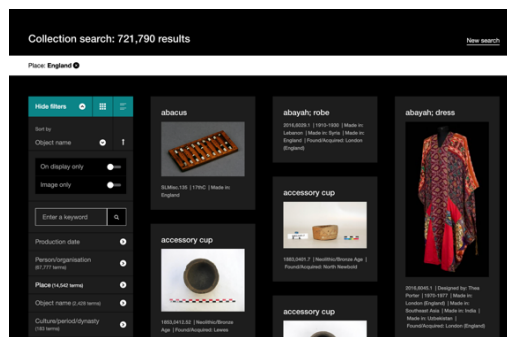
**Gambar 2.1.** Patung Batu Raksasa Hoa Hakananai'a di Galeri Living and Dying, British Museum

Sumber: The Guardian (2019)

Persebaran geografis koleksi tersebut menunjukkan karakter global yang dimiliki British Museum. Sebagian besar artefak yang tersimpan tidak berasal dari wilayah Britania Raya, melainkan dari berbagai kawasan seperti Afrika, Asia, dan Eropa. Analisis terhadap katalog daring museum yang dilakukan oleh Al Jazeera pada tahun 2023 menunjukkan bahwa Inggris tercatat sebagai kategori asal terbesar dengan 625.371 objek, diikuti oleh Irak dengan 164.140 objek dan Italia dengan 147.697 objek (Duggal & Haddad, 2023).

Namun demikian, kategori asal tersebut tidak selalu menunjukkan bahwa artefak tersebut diproduksi di wilayah Inggris. Dalam banyak kasus, penandaan tersebut dapat merujuk pada lokasi penemuan, tempat pengumpulan, atau lokasi di mana artefak tersebut diproses dan dimasukkan ke dalam koleksi museum. Untuk memfasilitasi akses terhadap koleksi yang sangat besar tersebut, British Museum menyediakan

sistem katalog daring yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pencarian berdasarkan berbagai parameter. Pengunjung dapat menelusuri koleksi dengan menggunakan kata kunci tertentu, seperti jenis objek, lokasi penemuan, tokoh yang terkait, tahun pembuatan atau penemuan, serta kategori budaya, periode, dinasti, atau kelompok etnis yang berkaitan dengan artefak tersebut.



**Gambar 2.2.** Laman Koleksi Online British Museum

Sumber: British Museum

Dalam perkembangannya, British Museum memperoleh koleksi dari berbagai sumber. Sumber koleksi British Museum dapat dilacak kembali ke masa kekaisaran Inggris. Pada kanal web resmi British Museum, ditulis beberapa cara British Museum mendapatkan koleksinya, mulai dari penggalian hingga pembelian, sumbangan, atau pemesanan dari individu, konflik, dan aktivitas kolonial.

#### **a. Donasi atau Warisan**

Donasi atau warisan merupakan salah satu mekanisme utama dalam pembentukan awal koleksi British Museum, terutama pada masa imperialisme. Pada periode tersebut, praktik mengoleksi artefak dan benda

seni menjadi bagian dari gaya hidup kalangan bangsawan Eropa (Procter, 2020). Para bangsawan berlomba-lomba untuk mengumpulkan dan memajang koleksinya di mansion mereka, dengan barang-barang asing dari negeri atau budaya lain yang dianggap lebih unik. Oleh karena itu, koleksi-koleksi yang dimiliki oleh para bangsawan sering kali diperoleh melalui perjalanan, ekspedisi, maupun jaringan perdagangan global yang berkembang seiring dengan ekspansi imperial Inggris (Caygill, 1992).

Banyak kolektor pada masa itu juga memiliki posisi sebagai diplomat atau pejabat kolonial, sehingga memiliki akses terhadap berbagai objek dari wilayah luar Eropa. Artefak yang mereka kumpulkan dapat diperoleh melalui pertukaran, pembelian, maupun pemberian dari masyarakat lokal, baik dalam bentuk upeti maupun hadiah. Dalam beberapa kasus, objek tersebut kemudian diwariskan kepada keluarga atau disumbangkan kepada institusi seperti museum (Procter, 2020; *Collecting Histories | British Museum*, t.t.)

Sebagai contoh, Sir Thomas Stamford Raffles mendonasikan sekitar 2.100 objek dari Indonesia dan wilayah sekitarnya yang ia kumpulkan selama masa jabatannya dalam struktur kolonial (Green, 2019). Selain itu, terdapat pula koleksi Sutton Hoo yang ditemukan oleh seorang pemilik lahan dan kemudian didonasikan kepada museum pada tahun 1939 setelah proses ekskavasi selesai. Temuan ini merupakan pemakaman kapal besar yang penuh dengan berbagai artefak penting dari periode Anglo-Saxon. Harta-harta tersebut seperti objek dari zaman Bizantium, perhiasan atau

aksesori emas, dan yang paling terkenal, helm-helm besi kesatria pada masa itu (*The Anglo-Saxon ship burial at Sutton Hoo | British Museum, t.t.*).

#### **b. Ekskavasi dan Ekspidisi Ilmiah atau Arkeologis**

Ekskavasi dan ekspedisi ilmiah merupakan salah satu mekanisme paling kolaboratif dalam pengumpulan koleksi British Museum. Melalui kerja sama dengan pemerintah lokal, arkeolog dari Inggris melakukan penelitian lapangan, penggalian, serta eksplorasi di berbagai wilayah untuk menemukan artefak bersejarah. Ilmuwan, arkeolog, dan bahkan bangsawan kolektor telah melakukan hal seperti ini sejak masa imperialisme, mengeksplorasi suatu situs bersejarah dan membawa pulang temuan yang dianggap unik dan menarik.

Pada akhir abad ke-19 hingga abad ke-20, praktik ini mulai melibatkan sistem pembagian hasil, di mana sebagian artefak tetap berada di negara asal, sementara sebagian lainnya dibawa ke institusi asing seperti British Museum. Contoh kerja sama tersebut dapat dilihat dalam proyek-proyek arkeologi di Irak, di mana British Museum terlibat dalam penggalian situs-situs bersejarah, termasuk wilayah Tello dan Darband-i-Rania. Selain itu, museum juga menjalankan program pelatihan pengelolaan warisan budaya yang melibatkan arkeolog lokal. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ekskavasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengumpulan artefak, tetapi juga sebagai bagian dari kerja sama penelitian lintas negara (*Collecting Histories | British Museum, t.t.*).

### **c. Pembelian atau Komisi**

Pembelian merupakan salah satu mekanisme yang lazim digunakan oleh British Museum dalam memperoleh koleksi. Dalam mekanisme ini, museum membeli artefak melalui pasar seni internasional, baik dari kolektor, dealer, maupun rumah lelang, dengan menggunakan dana publik maupun dukungan dari hibah dan donasi. Pembelian umumnya dilakukan terhadap objek yang dianggap memiliki nilai historis, artistik, atau ilmiah yang signifikan, serta relevan dengan pengembangan koleksi museum. Namun, praktik pembelian juga menjadi perhatian, terutama terkait dengan asal-usul artefak yang diperjualbelikan. Dalam beberapa kasus, artefak diperoleh melalui perantara atau pihak ketiga yang legalitasnya dipertanyakan (*Collecting Histories | British Museum, t.t.*).

### **d. Harta Karun (Treasures)**

Di wilayah Britania Raya, sebagian koleksi diperoleh melalui mekanisme hukum yang dikenal sebagai Treasure Act 1996. Undang-undang ini mengatur bahwa setiap penemuan benda berharga tertentu, seperti emas, perak, atau kumpulan koin yang berusia lebih dari 300 tahun, wajib dilaporkan kepada otoritas terkait (*The Portable Antiquities Scheme & The British Museum, t.t.*). Proses ini dikelola melalui *Portable Antiquities Scheme* (PAS) untuk mendokumentasikan penemuan artefak oleh masyarakat serta memastikan bahwa objek tersebut dicatat dalam basis data nasional. Melalui mekanisme ini, artefak yang ditemukan oleh individu dapat menjadi bagian dari koleksi museum, sekaligus memberikan

kontribusi terhadap dokumentasi warisan budaya di tingkat nasional (*Treasure and the Portable Antiquities Scheme*, t.t.).

**e. Konflik, Hasil Jarahan, atau Asal-usul yang tidak jelas**

Selain mekanisme formal, terdapat pula koleksi yang diperoleh dalam konteks konflik, penjarahan, atau kondisi dengan asal-usul yang tidak sepenuhnya jelas. Banyak artefak yang masuk ke dalam koleksi British Museum selama periode ekspansi imperial Inggris, di mana proses pengambilannya berlangsung dalam situasi ketimpangan kekuasaan. Pada periode kolonial, artefak dari wilayah koloni atau wilayah yang berada di bawah pengaruh Inggris dipindahkan ke London melalui berbagai cara, termasuk pengambilalihan dalam situasi konflik atau ketimpangan kekuasaan. Dalam beberapa kasus, artefak diperoleh melalui pengambilalihan dalam konflik bersenjata atau dalam kondisi ketika masyarakat lokal tidak memiliki posisi yang setara untuk menolak. Kondisi ini banyak terjadi di wilayah koloni Inggris, termasuk di Afrika dan Amerika (*Collecting Histories | British Museum*, t.t.).

Dari berbagai mekanisme pengoleksian British Museum, isu yang kerap menjadi perhatian secara global adalah perolehan artefak dalam konteks kolonial, konflik, dan ekspansi imperial Inggris. Kondisi sebagian besar koleksi British Museum menunjukkan bahwa tidak semua koleksi memiliki catatan asal-usul yang jelas dan terdokumentasi secara lengkap, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai legitimasi kepemilikan dan transparansi proses akuisisi artefak tersebut. Hal ini menyebabkan banyak

artefak yang diperoleh dengan cara ini kerap menjadi kritik yang berulang kali diterima oleh British Museum (Ahamed-Barke, 2024). Di tengah berbagai kritik tersebut, British Museum tetap mempertahankan posisinya dengan membangun narasi tertentu mengenai perannya sebagai penjaga warisan budaya dunia dan institusi universal yang dianggap mampu melestarikan serta menyediakan akses global terhadap artefak-artefak tersebut.

### **2.3 Narasi dan Praktik Kepemilikan Artefak**

Objek koleksi dalam museum tidak dapat dijelaskan sendiri. Di sini peran institusi pengelola penting untuk menjelaskan, mengklasifikasikan, memamerkan, dan memaknai objek koleksi di hadapan publik luas. Peran tersebut menjadi semakin penting bagi museum yang menyimpan artefak dari berbagai wilayah dunia, seperti British Museum, karena setiap objek memiliki latar belakang sejarah, budaya, dan proses perolehan yang berbeda-beda. Sebagai institusi yang menyimpan jutaan artefak dari berbagai peradaban, British Museum secara konsisten membangun narasi yang menjelaskan posisi dan perannya dalam mengelola koleksi tersebut. Narasi ini tidak hanya berfungsi untuk memperkenalkan koleksi kepada publik, tetapi juga membentuk identitas museum sebagai institusi budaya global. Melalui situs resmi, publikasi institusional, pernyataan direktur, serta berbagai materi pameran, British Museum menggunakan sejumlah istilah dan frasa yang berulang untuk menggambarkan tujuan, fungsi, dan tanggung jawabnya terhadap koleksi yang dimiliki.

British Museum secara konsisten memosisikan dirinya sebagai “museum

dunia” yang menghadirkan sejarah dan kebudayaan manusia dalam skala global. Pemosisian tersebut tercermin dalam slogan resmi museum, yaitu “*a museum of the world, for the world*” (Skew Studio, t.t.), serta frasa “*discover two million years of human history and culture*” yang tersebar dalam deskripsi media sosialnya. Pandangan tersebut juga tercermin dalam pernyataan Direktur British Museum, Nicholas Cullinan, ketika diwawancarai oleh El País mengenai hubungan museum dengan identitas nasional. Cullinan menyatakan bahwa meskipun British Museum memiliki keterkaitan dengan identitas nasional Inggris, museum tersebut tetap mengusung perspektif yang bersifat internasional dan kosmopolitan sesuai dengan tujuannya untuk mempertemukan masyarakat dan budaya dalam dialog bersama. Ia juga menambahkan bahwa salah satu fokus utama museum saat ini adalah membangun hubungan yang lebih terbuka dengan komunitas global (López, 2025).

Dalam laman resminya, British Museum menyatakan bahwa museum bertujuan untuk menghadirkan berbagai kebudayaan manusia dari seluruh dunia di bawah satu atap, serta menempatkan dirinya sebagai institusi dengan koleksi yang luas dan beragam (*About Us | British Museum*, t.t.). Keberagaman asal-usul artefak menjadi salah satu karakteristik yang secara konsisten ditonjolkan dalam penjelasan resmi museum. Hal serupa juga terlihat dalam esai resmi mantan Direktur Hartwig Fischer yang menyatakan bahwa British Museum berupaya berkontribusi terhadap dimensi kemanusiaan dalam struktur global melalui peningkatan akses terhadap koleksi sebagai sarana pembelajaran dan pengetahuan (Fitz-Gibbon, 2020). Selain itu, Nicholas Cullinan menyatakan

bahwa British Museum bertujuan untuk menghubungkan negara-negara dan budaya, bukan membangun sekat di antara keduanya (Adams, 2025; Thomson, 2025).

Narasi global tersebut juga tercermin dalam deskripsi berbagai artefak yang menjadi objek sengketa repatriasi. Dalam pernyataan resmi Dewan Pengurus mengenai Parthenon Marbles, British Museum menyebut bahwa artefak tersebut merupakan bagian dari koleksi dunia yang saling terhubung dan termasuk dalam warisan bersama umat manusia yang melampaui batas-batas politik modern (*Parthenon Sculptures - the Trustees' Statement | British Museum, t.t.*). Penjelasan serupa juga ditemukan pada deskripsi artefak lain seperti Hoa Hakananai'a (Moai), di mana museum menekankan pentingnya memahami hubungan antarbudaya melalui keberadaan koleksi dari berbagai wilayah dunia dalam satu institusi (*Moai | British Museum, t.t.-a; The Parthenon Sculptures | British Museum, t.t.*).

Selain menekankan dimensi global koleksinya, British Museum juga secara konsisten menggambarkan dirinya sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab terhadap pelestarian warisan budaya. Dalam berbagai pernyataan resmi, museum menyatakan komitmennya untuk menjaga, meneliti, dan menyebarluaskan nilai warisan budaya bagi masyarakat luas (*Parthenon Sculptures - the Trustees' Statement | British Museum, t.t.*). Komitmen tersebut sejalan dengan deskripsi institusi yang menyebut British Museum sebagai pemegang amanah atas koleksi seni dan artefak dari berbagai kebudayaan di dunia (*About Us | British Museum, 2013*). Maka, semua peninggalan sejarah

dalam British Museum telah dianggap sebagai objek-objek dengan keunggulan dan signifikansi besar dalam peradaban dunia, tidak hanya dalam konteks kebudayaan lokal.

Dalam mempertahankan koleksi yang dimilikinya, British Museum juga mengemukakan berbagai dasar hukum dan historis. Salah satu argumen yang kerap digunakan adalah bahwa sebagian besar artefak diperoleh sesuai dengan ketentuan hukum dan praktik yang berlaku pada masa akuisisi dilakukan. Posisi ini terlihat dalam kasus Parthenon Marbles, yang menurut pernyataan resmi museum diperoleh oleh Lord Elgin dengan izin dari otoritas Kesultanan Ottoman pada awal abad ke-19 (*Parthenon Sculptures - the Trustees' Statement | British Museum*, t.t.). Penjelasan serupa juga digunakan dalam kasus Rosetta Stone, yang diperoleh Inggris melalui Treaty of Alexandria setelah berakhirnya pendudukan Perancis di Mesir (*The Rosetta Stone*, t.t.)

Dalam tatanan hukum kontemporer, pengelolaan koleksi British Museum diatur melalui British Museum Act 1963. Undang-undang ini secara eksplisit membatasi kewenangan museum untuk melepaskan objek dari koleksinya secara permanen, kecuali dalam kondisi tertentu yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Berdasarkan undang-undang tersebut, British Museum bersifat independen dari pemerintah dan dikelola oleh dewan pengurus. Ketentuan tersebut sering disebut oleh pihak museum sebagai salah satu hambatan utama dalam proses pengembalian permanen artefak kepada negara asal karena setiap langkahnya merupakan langkah politik yang signifikan (Johnson, 2025; UK Legislation, 1963). Posisi ini juga diperkuat

melalui putusan *Attorney General v. Trustees of the British Museum* (*Attorney-General v Trustees Of The British Museum* (2005) | *Maitland Chambers*, t.t.) EWHC 1089 (Ch), yang menegaskan bahwa kewajiban moral saja tidak cukup untuk menjadi dasar hukum pelepasan koleksi. Meskipun demikian, perkembangan terbaru muncul melalui Charities Act 2022 yang memberikan ruang bagi lembaga amal, termasuk museum tertentu, untuk mempertimbangkan pelepasan objek apabila terdapat alasan moral yang kuat (Carrigan, 2024). Hingga saat penelitian ini dilakukan, British Museum belum melakukan perubahan kebijakan yang signifikan sebagai respons terhadap ketentuan tersebut.

Dalam praktiknya, keterbatasan hukum yang diatur dalam British Museum Act 1963 membuat pengembalian permanen koleksi menjadi sangat jarang dilakukan. Sebagian besar objek yang pernah dikembalikan berkaitan dengan sisa-sisa manusia (*human remains*) atau artefak yang terbukti dijarah oleh Nazi pada masa Perang Dunia Kedua. Menurut laporan The Telegraph, sejak tahun 2015 British Museum telah menerima sedikitnya 12 permintaan resmi pengembalian artefak dari berbagai pihak, termasuk beberapa yang diajukan melalui jalur diplomatik. Namun, museum tidak mengungkapkan secara rinci identitas seluruh pemohon maupun objek yang menjadi subjek pembahasan karena sebagian proses masih berlangsung (Shirreff, 2024).

#### Items formally demanded back from British Museum

- 15 slabs, 17 statues and a frieze from the Parthenon (the Elgin Marbles) – Greece
- 2 Dja Dja Wurrung barks – Australia
- 133 sculptures from Amaravati – India
- The Ngadji Drum – Kenya
- The Gweagal Shield – Australia
- Marble relief showing two Roman freedmen – Italy
- The Moai statue from Rapa Nui (Easter Island) – Chile
- 11 altar tablets – Ethiopia
- The Benin Bronzes – Nigeria
- Asante gold regalia – Ghana

**Gambar 2.3.** Daftar Barang yang Diminta untuk Dikembalikan dari British Museum

Sumber: The Telegraph

Sebagai respons terhadap meningkatnya tuntutan repatriasi dari berbagai negara dan komunitas asal, British Museum menawarkan mekanisme pinjaman jangka panjang (*long-term loan*) sebagai salah satu alternatif terhadap pengembalian permanen atau restitusi artefak. Dalam laman resminya yang bertajuk *International*, British Museum menyatakan bahwa program pinjaman koleksi, kegiatan riset, dan pameran keliling merupakan beberapa instrumen yang digunakan museum untuk membangun hubungan internasional serta memperluas akses publik terhadap koleksinya (*International | The British Museum*, t.t.).

Melalui mekanisme ini, artefak dapat dipindahkan secara fisik ke negara atau institusi pemohon untuk jangka waktu tertentu, tetapi, status kepemilikan hukum atas objek tersebut tetap berada di bawah pengelolaan British Museum. Salah satu contoh penerapan kebijakan ini dapat dilihat pada kasus Ghana. British Museum bersama Victoria & Albert Museum mengembalikan sejumlah artefak emas dan perak yang berkaitan dengan Kerajaan Asante melalui skema pinjaman jangka panjang. Objek-objek tersebut mencakup 17 regalia

kerajaan Asante yang diperoleh setelah penjarahan pasukan Inggris terhadap istana kerajaan di Kumasi pada tahun 1874 (Bossah, 2024). Dalam perjanjian tersebut, artefak dapat dipamerkan di Ghana untuk periode tertentu, namun tetap harus dikembalikan kepada museum setelah masa pinjaman berakhir. Dengan demikian, kebijakan *long-term loan* menjadi salah satu pendekatan yang digunakan museum untuk merespons tuntutan pengembalian artefak tanpa mengubah status kepemilikan koleksi.

Dalam kerangka hukum internasional, pengaturan mengenai repatriasi warisan budaya salah satunya diatur melalui Konvensi UNESCO 1970 tentang Sarana Pelarangan dan Pencegahan Impor, Ekspor, dan Transfer Kepemilikan Properti Budaya secara Ilegal. Inggris meratifikasi konvensi tersebut pada tahun 2002 dan mengakui prinsip-prinsip perlindungan warisan budaya yang terkandung di dalamnya. Implementasi konvensi ini turut didukung oleh Intergovernmental Committee for Promoting the Return of Cultural Property to its Countries of Origin or its Restitution in Case of Illicit Appropriation (ICPRCP), yang berfungsi sebagai fasilitator dialog dan negosiasi antara negara-negara yang terlibat dalam sengketa warisan budaya (*Return and Restitution under the aegis of the ICPRCP* | UNESCO, 2024).

Namun, Konvensi UNESCO 1970 memiliki ruang lingkup yang terbatas. Konvensi tersebut hanya berlaku terhadap objek budaya yang dipindahkan atau diperoleh setelah tahun 1970, sehingga tidak berlaku surut terhadap sebagian besar artefak yang diperoleh pada masa kolonial maupun imperial sebelum periode tersebut (*About 1970 Convention* | UNESCO, 2025). Selain itu, ICPRCP

berperan sebagai mediator dan pemberi rekomendasi, sehingga keputusan yang dihasilkan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa repatriasi pada umumnya tetap bergantung pada proses negosiasi dan kesepakatan para pihak yang terlibat.

Di sisi lain, British Museum merupakan institusi yang dikelola oleh Dewan Pengurus (*Board of Trustees*) dan bukan lembaga pemerintah. Dewan Pengurus memiliki tanggung jawab penuh atas seluruh koleksi yang berada di bawah pengawasannya, termasuk dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan dan pemindahan koleksi (*Parthenon Sculptures - the Trustees' Statement | British Museum*, t.t.). Struktur kelembagaan ini menyebabkan British Museum tidak memiliki kewajiban langsung untuk mengikuti rekomendasi yang dikeluarkan oleh UNESCO maupun ICPRCP. Salah satu karakteristik sistem *Board of Trustees* adalah memberikan tingkat independensi yang relatif tinggi terhadap pengaruh eksternal, termasuk tekanan politik dari berbagai pihak (Godwin, 2020). Oleh karena itu, British Museum menyatakan bahwa keterlibatan UNESCO bukan merupakan langkah yang paling tepat untuk menyelesaikan persoalan tersebut (*Parthenon Sculptures - the Trustees' Statement | British Museum*, t.t.). Sementara itu, ICPRCP hanya dapat memfasilitasi dialog dan komunikasi antarnegara, sehingga interaksi formal komite tersebut umumnya dilakukan melalui pemerintah Inggris.

Hubungan antara British Museum, pemerintah Inggris, dan berbagai mekanisme internasional menunjukkan bahwa isu repatriasi tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan artefak, tetapi juga melibatkan aspek

kelembagaan, hukum, dan diplomasi. Hingga saat penelitian ini dilakukan, berbagai tuntutan pengembalian artefak masih terus diajukan oleh negara maupun komunitas asal, sehingga menjadikan British Museum sebagai salah satu institusi yang paling sering terlibat dalam perdebatan mengenai repatriasi warisan budaya.

## **2.4 Kontroversi British Museum dan Tuntutan Repatriasi**

Repatriasi warisan budaya merupakan proses pengembalian objek budaya atau benda bersejarah kepada negara atau komunitas asal. Tuntutan repatriasi semakin berkembang setelah Perang Dunia Kedua dan menguat seiring proses dekolonisasi pada dekade 1960-an, ketika banyak negara bekas koloni mulai menuntut pengembalian warisan budaya mereka dari negara-negara penjajah (German, 2020; Stahn, 2023). Selain itu, Konvensi UNESCO 1970 turut memperkuat perhatian internasional terhadap pengembalian benda budaya yang dipindahkan secara tidak sah.

Sebagai salah satu museum terbesar di dunia, British Museum menjadi institusi yang sering menghadapi tuntutan repatriasi. Permintaan formal pertama datang dari pemerintah Yunani pada tahun 1983 terkait Parthenon Marbles dan ditolak pada tahun 1984 (Shirreff, 2024). Sejak saat itu, British Museum kerap menjadi pusat perhatian dalam isu perdebatan artefak budaya di masa kontemporer.

### **A. Sengketa Parthenon Marbles**

Parthenon Marbles atau Marmer Parthenon atau Marmer Elgin merupakan karya pahatan dari marmer yang berasal dari situs Kuil Athena

(Parthenon) di Akropolis, Athena. Kuil ini merupakan kuil peninggalan Yunani Kuno yang dibangun dengan dewi Athena sebagai pusat spiritualnya (Rudenstine, 2021). Kuil tersebut kurang lebih terdiri dari serangkaian relief pahatan yang menggambarkan kehidupan pada masa tersebut serta patung-patung para dewa dan pahlawan legendaris pada bagian atas atap kuil. Bangunan Parthenon bertahan utuh hampir sepenuhnya sampai terjadinya kerusakan terbesar karena ledakan bom yang terjadi ketika perang antara Ottoman dan Venesia pada tahun 1687 (Lobell, 2015; *The Parthenon Sculptures* | *British Museum*, t.t.).

Pada tahun 1801, Thomas Bruce, Earl of Elgin ketujuh, datang ke Yunani sebagai Duta Besar Britania Raya untuk Kesultanan Ottoman. Ia sangat menyukai keindahan kuil Parthenon, sehingga pun mempekerjakan sebuah tim untuk membuat replika dan cetakan patung-patung tersebut untuk menghiasi kediamannya (*The Parthenon Marbles – Melina Mercouri Foundation*, t.t.). Namun, ambisi Lord Elgin berubah ketika Rev. Dr. Philip Hunt, anggota rombongannya, menyatakan bahwa ia mendapatkan akses yang lebih luas dengan menyuap seorang pejabat Ottoman lain. Izin yang diberikan sekarang tidak hanya untuk menggambar dan mencetak, tetapi juga untuk mulai mengangkat pahatan dari tembok Parthenon. Pada saat pahatan pertama diangkat turun dari tembok, Elgin masih berada di Konstantinopel dan tidak mengetahui apa yang sedang dilakukan atas namanya (Rudenstine, 2021). Sebagai hasil, rombongan Elgin menyebabkan kerusakan struktural yang jauh melampaui izin awal yang diberikan oleh

pihak berwenang Ottoman (Cherry & Campbell, 2021).

Dalam prosesnya, Elgin mengambil setengah dari patung-patung yang tersisa dari Parthenon. Pada saat ini, British Museum merumahi 15 metope, 17 patung, dan 247 kaki (75 m) dari relief asli (*The Parthenon Sculptures | British Museum*, t.t.). Peninggalan bersejarah ini menjadi salah satu objek utama di British Museum yang ditempatkan di galeri khusus bertema kuil Yunani Kuno, “Greece: Parthenon”. Namun demikian, ambiguitas proses akuisisi artefak ini terus menjadi pusat sengketa hingga saat ini. Inti permasalahannya adalah pertanyaan apakah Elgin benar mendapatkan izin resmi tertulis dari otoritas Ottoman untuk melepaskan pahatan dari tembok Parthenon. Untuk itu, Pada tahun 1816, Parlemen Britania membentuk *Select Committee* untuk menyelidiki apakah tepat bagi pemerintah untuk membeli koleksi Elgin. Komite tersebut mendengar kesaksian Elgin sendiri, Rev. Hunt, dan saksi-saksi lainnya. Berdasarkan rekomendasinya, Parlemen membeli koleksi tersebut dan koleksi itu ditempatkan di British Museum (Wilson, 2002, dalam Rudenstine, 2021; Cherry & Campbell, 2021; *The Parthenon Marbles – Melina Mercouri Foundation*, t.t.).



**Gambar 2.4.** Parthenon Marbles di Galeri British Museum  
Sumber: The British Museum

Yunani telah menentang keberadaan Parthenon Marbles di British Museum sejak mendapatkan kemerdekaannya. Hanya empat tahun setelah kemerdekaan, pada tahun 1834, undang-undang nasional pertama tentang benda purbakala diberlakukan, yang secara formal melindungi warisan budaya dan mengkarakterisasi benda purbakala sebagai milik nasional (Voudouri, 2010). Upaya diplomatik besar dipimpin pada tahun 1983 oleh Melina Mercouri, Menteri Kebudayaan Yunani saat itu, yang menekankan patung-patung tersebut sebagai elemen sentral dari identitas (*The Parthenon Marbles – Melina Mercouri Foundation*, t.t.). Yunani Argumen dari Yunani menyatakan bahwa izin Elgin untuk melepaskan pahatan yang ada di Parthenon tidak valid.

Dokumen Ottoman asli yang diklaim Elgin diperolehnya dari pejabat Konstantinopel tidak pernah ditemukan. Tidak ada referensi terhadapnya dalam arsip Kesultanan Ottoman maupun salinannya di catatan Kantor Luar

Negeri Britania. Satu-satunya referensi berupa dokumen terjemahan berbahasa Italia yang memuat izin awal Elgin dan sama sekali tidak menyebut izin untuk melepaskan pahatan dari tembok-tembok tinggi Parthenon (Rudenstine, 2021). Pihak Yunani terus mendorong argumen bahwa yang telah dilakukan Elgin merupakan suatu pengrusakan monumen bersejarah tanpa izin yang legal dan dapat dibuktikan. Dalam berbagai argumennya, Yunani menyatakan bahwa Elgin memotong beberapa relief dan patung pada kuil Parthenon secara sengaja dengan gergaji. Hal ini berdasarkan pada beberapa sumber termasuk testimoni pada Sidang *Select Committee of the House of Common* dan keadaan kuil parthenon yang semakin rusak setelah kedatangan rombongan Elgin (*The Time of Removal – Melina Mercuri Foundation*, t.t.).

Dari sisi narasi yang bertentangan, British Museum mempertahankan bahwa pahatan-pahatan tersebut diperoleh secara legal dan bahwa koleksi tersebut berfungsi sebagai bagian dari warisan bersama umat manusia. British Museum berargumen bahwa Parthenon Marbles seharusnya tetap berada di London agar orang-orang di seluruh dunia dapat melihat bagian dari Parthenon sebagai sejarah penting peradaban manusia, bukan hanya sejarah Yunani (*The Parthenon Sculptures | British Museum*, t.t.). Dalam rapat tahunan ICPRCP 2022, Wakil Direktur British Museum menyatakan bahwa Parthenon Marbles yang diambil oleh Elgin merupakan reruntuhan kuil. Ia menambahkan bahwa jika memang Parthenon Marbles dikembalikan ke Athena, kuil tetap tidak akan lengkap kembali karena lebih

dari 50% bangunan sudah runtuh. Sampai saat ini, pihak British Museum tetap bertahan dengan argumen bahwa tujuan keberadaan Parthenon Marbles ada di dalam koleksinya adalah untuk akses global dan kolaborasi (Adams, 2022, 2025)

Dari sisi tekanan internasional yang meningkat, berbagai pihak telah mengambil langkah yang semakin mempersempit ruang gerak British Museum. Vatikan mengembalikan tiga fragmen Parthenon kepada Yunani pada Maret 2023 (Radford, 2023) dan Jerman mengembalikan sebuah kepala marmer kuno kepada Yunani pada November 2024 (Morton, 2024). Dalam Sidang ICPRCP ke-25 yang dilaksanakan pada Mei 2026, sebanyak 20 negara secara resmi menyatakan dukungan mereka terhadap permintaan Yunani agar Parthenon Marbles dikembalikan secara permanen dari British Museum. Turki, sebagai negara pengamat, berargumen bahwa tidak ada dokumen yang dapat melegitimasi pemindahan patung tersebut dan menyerukan kepada Inggris untuk tidak memakai dokumen yang keberadaanya tidak jelas dalam forum antarpemerintah (Sela-Eitam, 2026).

Sampai saat ini, British Museum tetap pada posisi menawarkan skema pinjaman jangka panjang sebagai alternatif pengembalian permanen, sementara Yunani secara konsisten menegaskan bahwa pinjaman, apapun bentuknya, tidak dapat menggantikan pengakuan atas hak kepemilikan yang sah atas pahatan-pahatan yang dipandang sebagai warisan budaya dan bentuk identitas nasional Yunani.

## B. Sengketa Benin Bronzes

Benin Bronze merujuk pada koleksi besar artefak kerajaan yang berasal dari Kerajaan Benin (Sekarang Nigeria Selatan). Meskipun disebut "bronze," koleksi ini sesungguhnya terdiri atas berbagai medium: plakat-plakat relief dari kuningan (*brass*), kepala-kepala komemoratif dari perunggu, gading ukiran, manik-manik koral, besi, kayu, dan benda-benda seremonial lainnya. Plakat kuningan kotak dahulu menghiasi tiang-tiang istana kerajaan, menggambarkan sejarah seremonial dan politik Kerajaan Benin (Hicks, 2021). Koleksi karya seni merupakan salah satu arsip hidup dari sebuah peradaban yang besar.



**Gambar 2.5.** Display Benin Bronze di British Museum

Sumber: Son of Groucho/Flickr dalam artikel Independent UK

Pada tahun 1897, pasukan Inggris di bawah komando Laksamana Harry Rawson melancarkan serangan militer yang menghancurkan Kota Benin selama sekitar tiga minggu. Serangan ini merupakan hasil konflik antara

Pasukan Inggris dan Kerajaan Benin yang telah terjadi lama. Di tengah tingginya ambisi kolonialisme dan transaksi budak dari benua Afrika yang dirasakan negara-negara Eropa, termasuk Inggris, kerajaan bagian seperti Benin mulai melawan dan menolak penjajahan Inggris (*Benin Bronzes | British Museum*, t.t.; Hicks, 2021). Perlawanan Kerajaan Benin dibalas dengan kehancuran Kota Benin, dengan istana kerajaan, kuil leluhur, bengkel pengrajin, dan monumen tanahnya yang luar biasa (Hicks, 2021).

Di tengah penghancuran itu, ribuan artefak kerajaan dijarah oleh pasukan Inggris. Sebagian besar penjarahan dilakukan secara informal oleh individu-individu untuk keuntungan pribadi mereka. Plakat-plakat kuningan sebagian dilaporkan sebagai rampasan resmi, sementara sebagian besar benda kecil lainnya "dibagi di antara para perwira," (Hicks, 2021). Pada tahun 1897, 304 plakat sudah dipajang sementara di *Assyrian Saloon* British Museum, lalu koleksi itu dibagi ke koleksi British Museum, dealer, kolektor, dan museum lain di seluruh Eropa dan Amerika (Hicks, 2020). Estimasi terkini memperkirakan total benda yang dijarah mencapai lebih dari 5.000 objek, yang kini tersebar di lebih dari 160 koleksi di seluruh dunia (*Benin Bronzes | British Museum*, t.t.; Hicks, 2021; Laciste, 2023). Pada masa sekarang, British Museum memiliki 900 objek dari Benin, di mana hanya 50 buah plakat darinya dipamerkan di Galeri Afrika (*Benin Bronzes | British Museum*, t.t.).

Klaim restitusi Benin sudah berlangsung lama. Setelah kemerdekaan Nigeria pada 1960, tekanan repatriasi meningkat. Momen penting terjadi

pada 1977, ketika Nigeria menjadi tuan rumah *Second World Black and African Festival of Arts and Culture* (FESTAC) di Lagos. Nigeria meminta topeng gading Ratu Idia dari British Museum karena objek tersebut menjadi simbol festival, namun permintaan itu ditolak oleh British Museum dengan alasan kondisi dan transportasi yang mengkhawatirkan (Hicks, 2021). Pada 1980-an dan 1990-an, pemerintah Nigeria terus mengulangi tuntutan, dengan pejabat kebudayaan menyatakan bahwa "semua harta seni kita yang diambil secara ilegal harus dikembalikan ke Nigeria" (Hicks, 2021). Tekanan mencapai titik puncak baru pada Januari 2002, ketika Parlemen Nigeria dengan suara bulat mengesahkan mosi yang menuntut Presiden Obasanjo untuk mendesak pengembalian Benin Bronze dari British Museum (Hicks, 2021).

British Museum telah menolak pengembalian dengan sejumlah dalih yang sama, bahwa restitusi adalah ilegal di bawah *British Museum Act 1963*, bahwa benda-benda itu lebih aman di London, dan bahwa koleksi tersebut dapat dinikmati oleh audiens yang lebih luas dalam "museum universal" (Hicks, 2021). British Museum membenarkan bahwa koleksi ini diambil dengan cara yang salah di halaman resmi Benin Bronze, walau secara implisit (*Benin Bronzes | British Museum*, t.t.). Namun, posisi British Museum tetap bertahan pada argumen bahwa British Museum terikat pada suatu aturan dan tidak bisa mengembalikan Benin Bronze secara permanen. British Museum secara aktif membangun dialog dan kerja sama dengan Nigeria mengenai Benin Bronze dan artefak Afrika lainnya. Komunikasi ini

direalisasikan dengan pembentukan “Kelompok Dialog Benin” bersama perwakilan Nigeria, Program Pelatihan Internasional Museum, serta Proyek Arkeologi MOWAA, yang berfokus pada penggalian arkeologi prakonstruksi dan program pertukaran pengetahuan di Kota Benin (*Benin Bronzes | British Museum, t.t.*). Namun, tekanan internasional terhadap British Museum mulai meningkat, dengan semakin banyak museum di Eropa dan Amerika yang telah mengembalikan Benin Bronze ke Nigeria.

Jerman menjadi pemerintah nasional pertama yang menetapkan tenggat waktu pengembalian, dengan mengumumkan pada April 2021 bahwa institusi-institusinya akan memulai proses pengembalian seribu artefak benin pada tahun-tahun berikutnya. Pada 2022, Jerman secara resmi mengembalikan 22 objek pertama kepada Nigeria secara fisik (Al Jazeera, 2022). Di tahun yang sama, Horniman Museum di London menjadi museum pemerintah pertama di Inggris yang mengembalikan seluruh 72 Benin Bronze-nya, diikuti oleh Universitas Cambridge yang mendukung permintaan NCMM Nigeria untuk mengembalikan sekitar 100 artefak (Okafor & Burchell, 2026). Pada November 2021, 26 artefak era kolonial dikembalikan secara resmi oleh Perancis kepada Republik Benin dan Belanda melakukan pengembalian terbesar dalam sejarah restitusi Benin Bronze, sebanyak 119 artefak, melalui upacara resmi di Lagos pada Juni 2025 (Sasse & Ross, 2021; Al Jazeera, 2025).

Laporan *Restituer le Patrimoine Africain* (yang ditugaskan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron memberikan kerangka moral yang berpengaruh

bagi restitusi skala besar dari museum-museum mantan kolonial ke Afrika (Sarr & Savoy, 2018). Kecuali British Museum, yang masih belum melakukan pengembalian resmi dan terus mendorong agenda peminjaman sementara. Saat koleksi tersebut bisa kembali ke Nigeria menjadi suatu hal yang terus ditunggu oleh seluruh orang Benin, yang ada di Nigeria maupun lainnya.

### **C. Kontroversi Objek Lainnya**

Selain artefak budaya, British Museum juga menyimpan sisa-sisa manusia dari berbagai negara yang sebagian besar diperoleh dalam konteks kolonialisme. Total sisa-sisa manusia di British Museum sekitar 6000 buah (Batty, 2026; *Human remains* | *British Museum*, t.t.). Sisa-sisa tersebut sering kali dibawa ke Britania oleh para penjelajah dan tentara sebagai "suvenir" pada abad ke-18 dan ke-19, tanpa persetujuan komunitas yang bersangkutan.

Di Britania, Pasal 47 dari Human Tissue Act 2004 memungkinkan museum-museum nasional utama, termasuk British Museum, untuk memindahkan atau membuang sisa-sisa manusia dari koleksinya apabila diyakini secara wajar bahwa sisa-sisa tersebut merupakan sisa-sisa seseorang yang meninggal kurang dari 1.000 tahun sebelum diberlakukannya pasal tersebut. Beberapa sisa-sisa manusia sempat direpatriasi oleh British Museum, seperti sisa-sisa jenazah suku Aborigin Tasmania pada tahun 2006 dan suku Maori pada tahun 2008 (*Request for Repatriation of Human Remains to New Zealand*, t.t.; *Request for*

*Repatriation of Human Remains to Tasmania*, t.t.). Meskipun ketentuan ini membuka jalur hukum untuk pengembalian sebagian sisa-sisa manusia, progres dalam praktiknya dinilai lambat oleh komunitas-komunitas indigenous yang mengajukan tuntutan.

Sebagian besar sisa-sisa manusia di British Museum berbentuk mumi dari Afrika. British Museum adalah salah satu dari beberapa museum yang masih memajang sisa-sisa manusia dalam koleksinya. Hal ini menyebabkan banyak opini yang memandang bahwa yang dilakukan oleh British Museum tidak etis dan jauh dari kata-kata yang mereka tulis di deskripsi resmi, “...*Museum ini memastikan bahwa jenazah yang berada di bawah pengawasannya selalu diperlakukan dan dipamerkan dengan penuh hormat dan martabat.*”. Salah satu ketua fraksi parlemen, Bell Ribeiro-Addy, mengkritik tindakan British Museum dengan suatu pertanyaan bagaimana rasanya jika ada jenazah pemimpin Inggris dipamerkan di museum asing (Daley, 2025). Meskipun demikian, belum ada informasi baru terkait repatriasi sisa-sisa manusia ataupun penurunan *display* pada tahun 2026.

Komunitas-komunitas indigenous dari Amerika, Oseania, dan berbagai wilayah lainnya tidak hanya menuntut pengembalian sisa-sisa manusia, tetapi juga objek-objek yang memiliki nilai spiritual dan sakral yang tidak dapat diukur semata melalui standar estetis atau historis. Gweagal Shield merupakan perisai tua dari komunitas indigenous Australia yang diambil oleh petinggi Inggris pada masa kolonial (*Early Shield from Australia*, t.t.). Keturunan langsung komunitas Cooman, dari siapa Gweagal

Shield dicuri, menyatakan bahwa mereka tidak mengakui British Museum sebagai pemegang hak kepemilikan atas perisai tersebut.

Komunitas Rapa Nui dari Pulau Paskah, Chile, juga menuntut pengembalian Hoa Hakananai'a, sebuah patung moai yang dibawa ke Britania pada tahun 1868, yang dipandang sebagai objek dengan nilai spiritual yang dalam. Patung moai tersebut disebut sebagai gambaran dari nenek moyang penduduk Rapa Nui, dan melihat Hoa Hakananai'a di British Museum terasa seperti melihat tetua keluarga dipamerkan di museum asing (Bartlett, 2018). Komunitas Rapa Nui dan penduduk Pulau Paskah lainnya terus mendorong repatriasi Hoa Hakananai'a. Pada tahun 2024, media sosial British Museum dibanjiri komentar “Kembali kan Hoa Hakananai'a” pada satu unggahan. Gerakan ini merupakan suatu kampanye dari aktivis Chile. Sebagai balasan, komentar unggahan tersebut dimatikan oleh British Museum dan tidak ada balasan lain (Gregory, 2024). British Museum tetap bertahan dengan argumen bahwa tidak ada yang bisa dikembalikan jika British Museum Act 1963 masih berlaku dan Hoa Hakananai'a akan menjadi salah satu bagian dari sejarah manusia yang bisa dilihat di British Museum.

#### **D. Kasus Pencurian Artefak Internal 2023**

Pada 16 Agustus 2023, British Museum merilis pernyataan resmi yang mengonfirmasi bahwa sejumlah objek dari koleksinya telah ditemukan hilang, dicuri, atau rusak. Pimpinan pengurus George Osborne mengonfirmasi kepada BBC bahwa "sekitar 2.000" objek hilang, mencakup

perhiasan emas, permata, dan kaca bersejarah yang berasal dari rentang waktu abad ke-15 SM hingga abad ke-19 M. Tidak ada dari item-item tersebut yang baru-baru ini dipamerkan kepada publik dan disimpan terutama untuk keperluan akademis dan riset (Anthony, 2023).

Objek-objek tersebut diduga dijual melalui platform daring eBay dengan harga serendah 51 dolar Amerika. Pencurian berlangsung selama 30 tahun, dan banyak dari 2.000 item yang hilang berasal dari jutaan item dalam koleksi museum yang belum dikatalogkan atau difoto. Terungkap pula bahwa seorang pedagang barang antik asal Belanda, Ittai Gradel, telah mencoba memperingatkan pejabat museum pada tahun 2021, namun ia diberitahu bahwa masalah tersebut telah diselesaikan (Razzall, 2026).

Direktur Hartwig Fischer mengundurkan diri, menyatakan bahwa "British Museum tidak merespons secara komprehensif sebagaimana mestinya" dan bahwa "tanggung jawab atas kegagalan tersebut pada akhirnya berada di tangan direktur." Skandal ini secara langsung memperbarui seruan repatriasi dari berbagai negara, termasuk Yunani, yang menyatakan bahwa kejadian ini semakin memperkuat argumen bahwa British Museum tidak layak menjadi penjaga artefak milik bangsa lain (Anthony, 2023; Razzall, 2023; Sherwood, 2023).